

Lampung Post

Tribun Lampung

Halaman

Radar Lampung

1

Tanggal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Bulan	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	2021
	<input checked="" type="checkbox"/>												

Pemkot Bagi-Bagi Hibah

Gelontorkan Rp66,1 M untuk Instansi Mitra

BANDARLAMPUNG - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung tahun ini menghibahkan banyak anggaran untuk pembangunan beberapa instansi mitra atau di luar struktur lembaga pemkot. Ini

berdasarkan data di *website* sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Barang dan Jasa Pemkot Bandar Lampung tahun 2021.

Hibah anggaran dimaksud di antaranya untuk pembangunan Gedung Peradilan Semu dan Klinik Hukum Terpadu Unila sebesar Rp4,5 miliar, Gedung Pelayanan Satu Atap Polresta Bandar Lampung (tahap 1) Rp10 miliar, Gedung Parkir Kejati Lampung Rp10 miliar, Gedung Ombudsman Rp7 miliar, Gedung Polinela Rp16 miliar, dan Gedung Fakultas Teknik Unila Rp26 miliar.

Dari data LPSE tersebut, jelas anggaran yang dihibahkan Pemkot Bandar Lampung kepada instansi mitra di tahun 2021 jika ditotal mencapai Rp66,1 miliar.

Bahkan kini, pengerjaannya pun sedang berjalan dan diawasi jasa konsultasi badan usaha.

Seperti pengawasan pembangunan Gedung Polinela Rp480 juta, pengawasan pembangunan Gedung Pelayanan Satu Atap Polresta Bandar Lampung Rp299,9 juta, pengawasan Gedung Fakultas Hukum Unila dan Ombudsman Rp389,9 juta, pengawasan Gedung Parkir Mapolda Lampung Rp689 juta, dan pengawasan Gedung Fakultas Teknik Unila Rp779,9 juta.

Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bandar Lampung Iwan Gunawan pun membenarkannya. "Iya, semua yang ada di LPSE itu benar," kata Iwan melalui ponsel, Senin (25/1).

Saat ditanya seberapa penting fungsi hibah kepada instansi mitra tersebut sementara pembangunan di lingkungan pemkot sendiri banyak yang belum rampung, termasuk masih ada insentif lainnya belum terbayarkan, Iwan mengaku dirinya hanya menjalankan tugas sesuai perda yang sudah ada.

"Jangan tanya ke saya dong. Saya kan hanya menjalankan perda, karena sudah tugasnya," singkatnya.

Terpisah, Direktur Polinela Dr. Ir. Saroni, M.Si. pun mengakui jika pihaknya mendapatkan bantuan hibah pembangunan gedung sebagaimana tersebut dalam LPSE. "Pemkot memang mau memberikan bantuan berupa hibah ke Polinela, gedung kuliah. Sampai sekarang pembangunannya belum mulai, tetapi awal tahun ini katanya dibangunnya," ujar Saroni, Senin (25/1).

Hal sama disampaikan Wakil Rektor IV Bidang Perencanaan, Kerja Sama, Teknologi Informasi dan Komunikasi Unila Prof. Suharso, Ph.D. "Benar (ada hibah gedung dari Pemkot Bandar Lampung), berupa gedung di Fakultas Teknik senilai Rp26 miliar dan Gedung Peradilan Semu di Fakultas Hukum senilai Rp4,5 miliar," ujar Suharso, Senin (25/1).

Dia mengatakan saat ini gedung tersebut

belum dibangun. "Rencananya tahun ini. Lebih jelasnya PU (Dinas Pekerjaan Umum) Bandar Lampung yang tahu," tandasnya.

Sementara, Ketua Komisi III DPRD Bandar Lampung Yuhadi menilai pemkot terlalu memaksakan tanpa melihat kemampuan keuangan. Karena untuk awal tahun ini saja menurutnya sudah ada tender senilai Rp127 miliar yang dilakukan Dinas PU. Namun ironisnya dari aduan yang ia dapat, banyak rekanan yang mengeluh pekerjaan tahun 2020 saja tak kunjung terbayarkan oleh pemkot.

Lebih parahnya lagi, sambung Yuhadi, ada beberapa rekanan yang mengaku belum menerima pembayaran retensi tahun 2019 silam. "Kalau yang untuk pekerjaan 2020 kemarin ada aduan yang masuk ke saya, jangankan uang PHO, uang muka pun ada yang belum terbayarkan," ucapnya, Senin (25/1).

Padahal bila pihak ketiga telat menyele-

saikan pekerjaan, lanjut dia, terancam *punishment* berupa denda. "Jadi di sini kasihan pihak ketiga. Mereka sudah telanjur mengeluarkan uang untuk pekerjaan, tetapi belum ada pembayaran untuk mereka. Jangan juga lantas berlindung di balik pandemi, sementara ngotot melakukan tender," ucap politikus Golkar ini.

Padahal, lanjut Yuhadi, pihaknya telah melakukan teguran pada Dinas PU untuk tidak terburu-buru melakukan tender. "Semestinya pemkot, khususnya Dinas PU, bisa *cooling down* dahulu. Tunggu benar-benar ada kepastian dana yang masuk. Tentunya dengan memprioritaskan pembayaran pekerjaan di tahun sebelumnya yang menurut beberapa rekanan belum terbayarkan," sarannya. Alhasil, kata dia, tidak bisa dipungkiri bisa memicu argumen buruk di mata publik. "Jadi kesannya ada apa ini? Seperti kejar tayang," sindirnya. (mel/rma/sur/c1/rim)